



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 004/08012009
HARI : KAMIS
TANGGAL : 8 JANUARI 2009

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	THAILAND KTT ASEAN Bakal Dipindahkan ke Pantai Hua Hin	3
	Israel dan Hamas "Stop" Serangan: Warga Gaza Langsung Serbu Toko Roti	3
	Australia Janjikan Ubah Citra Buruk Indonesia di Media	5
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	Interfaith leaders urge UN to stop Israeli attacks	5
	Pemilu Harus Bersih dari Politisasi Isu Asing	6
	Pertemuan Informal RI-GAM Tetap Penting	7
	B. EKONOMI	
	SBY: Produk Indonesia Harus Lebih Kompetitif	7
	PENJUALAN PRODUK PERIKANAN Eksporir Perlu Jajaki Pasar Timur Tengah	8
	Indonesia Ekspor Beras pada Februari	9
	C. SOSBUD	
	RI bidik wisatawan kawasan Asean	9
	D. HANKAM	

			Presiden Minta Pasukan RI di Lebanon Jaga Keselamatan	10
			Mabes TNI Kirim Pasukan Perdamainan dari Unsur TNI AL	11
			Pulau Terluar Indonesia Terancam Hilang	11
	E.	HUKUM		--
	F.	OLAHRAGA		--
	G.	LINGKUNGAN HIDUP		
			Menristek Tolak Impor Bibit Hibrida	12
III.	ARTIKEL			
			Presuming a democratic Myanmar: Looking beyond election 2010 (by Nehginpao Kipgen)	13
IV.	LAIN-LAIN			--
V.	EDITORIAL			
			PBB dan Krisis Kepercayaan Dunia	14
			Akhiri Segera Kebrutalan di Gaza	15

Jakarta, 8 Januari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL

:

1. THAILAND KTT ASEAN Bakal Dipindahkan ke Pantai Hua Hin

Thailand akan menjadi tuan rumah KTT ke-14 ASEAN pada 27 Februari sampai 1 Maret di daerah wisata pantai Hua Hin, memindahkan tempat pelaksanaannya dari Bangkok untuk menghindari para pemrotes antipemerintah.

Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva mengaku perlu memindahkan tempat KTT ke Hua Hin, 150 km barat daya Bangkok. "untuk menjaga citra kita," katanya.

Aliansi Demokrasi Menentang Diktator (DAAD) berikrar akan menghambat KTT itu dalam satu tindakan balasan terhadap Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD), yang berusaha menggulingkan pemerintah yang pro-mantan PM Thaksin Shinawatra.

PAD memaksa pemerintah mantan PM Somchai Wongsawat mengubah rencana untuk menjadi tuan rumah KTT itu dari Bangkok ke Chiang Mai, 700 km utara ibu kota itu, dan kemudian menunda forum regional itu--yang menurut rencana diselenggarakan pertengahan Desember--setelah PAD menguasai dan menutup dua bandara Bangkok, 26 November-3 Desember 2008.

Thailand kini berada dalam satu pemerintah koalisi baru yang dipimpin ketua Partai Demokrat Abhisit, tetapi menghadapi satu gangguan demonstrasi yang serupa.

DAAD atau "baju merah," menyerukan Abhisit mundur, dengan memprotes setiap tindakannya sebagai tuan rumah KTT ASEAN, seperti halnya yang dilakukan PAD atau "baju kuning" terhadap pemerintahan sebelumnya.

Para pendukung Thaksin, yang ditumbangkan dalam kudeta militer pada 2006 dan kini tinggal di pengasingan untuk menghindari hukuman penjara atas dakwaan korupsi, telah berjanji untuk terus melancarkan protes menentang pemerintah hingga dilakukan pemilihan umum dini.

Mereka mengatakan, pemilihan Abhisit oleh parlemen bulan lalu adalah tidak sah karena penuh kecurangan. Dia mengambil alih kekuasaan setelah pemerintah pro-Thaksin dibubarkan oleh peradilan konstitusi pada 2 Desember.

Putusan itu dilakukan setelah berbulan-bulan aksi protes anti-Thaksin yang sempat menduduki bandar udara Bangkok lebih dari sepekan pada akhir tahun lalu, yang menyebabkan kerugian ekonomi miliaran dolar AS.

Sumber-sumber Kemlu Thailand mengatakan, China, satu mitra penting ASEAN, tidak dapat hadir pada konferensi itu jika diselenggarakan akhir Februari. "Penyelenggaraan (KTT) pada 27 Februari sampai 1 Maret menyulitkan China untuk datang karena sudah memiliki rencana penting sebelumnya," kata juru bicara Kemlu Thailand Tharit Charungvat. China pada saat itu sibuk dengan Kongres Nasional.

Walaupun China bukan anggota ASEAN, negara itu memiliki peran penting dalam KTT-KTT belakangan ini karena perhatian internasional berpindah dari Asia tenggara ke arah China sebagai kekuatan ekonomi dan politik masa depan. (Suara Karya)

2. Israel dan Hamas "Stop" Serangan: Warga Gaza Langsung Serbu Toko Roti

Militer Israel dan pejuang bersenjata Hamas, Rabu (7/1), "sepakat" menghentikan serangan selama tiga jam setiap harinya guna memberi kesempatan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza. Penghentian serangan itu antara pukul 1 siang hingga 4 sore waktu setempat (sekitar pukul 17.00-21.00 WIB).

Suara ledakan bom, tembakan senjata berat ataupun roket langsung senyap selama beberapa menit di Gaza City, menyusul pernyataan militer Israel itu. Tiga jam "gencatan senjata" itu untuk memberi kesempatan pada bantuan kemanusiaan seperti bahan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar masuk dan sampai ke tangan rakyat Gaza. Keputusan Israel itu muncul menyusul janji Perdana Menteri Israel Ehud Olmert untuk membuka akses masuk bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Meski berjanji menghentikan serangan untuk sementara, Israel menegaskan akan membalas jika Hamas tiba-tiba menyerang ketika "gencatan senjata sementara" itu berlaku. Israel telah melancarkan serangan udara sejak 27 Desember dan berlanjut dengan serangan darat. Akibat serangan selama 12 hari itu, sedikitnya 689 warga sipil tewas termasuk 220 anak-anak berusia di bawah 16 tahun, dan 3.100 orang cedera.

Moawiya Hassanein dari badan-badan kemanusiaan di Gaza City, Rabu menegaskan, sebagian besar anak-anak ini tewas setelah Israel melancarkan serangan darat menyusul serangan udara yang berawal 27 Desember lalu. Proporsi warga sipil yang tewas meningkat pesat begitu serangan darat dilakukan hari Sabtu lalu. Hari Selasa, sedikitnya 43 anak-anak yang berlindung pada sebuah sekolah di kawasan utara Jalur Gaza tewas dihantam mortir Israel.

Risiko jatuhnya korban di kalangan sipil kini semakin tinggi dengan pecahnya pertempuran kota ataupun kawasan-kawasan padat manusia di Jalur Gaza. Dengan 1,5 juta penduduk di areal seluas 400 kilometer persegi, Gaza merupakan salah satu kawasan padat manusia di dunia.

"Keprihatinan meningkat dengan semakin bertambahnya anak-anak dan keluarga mereka yang menyelamatkan diri dari medan pertempuran dan sasaran serangan Israel, sebab rumah mereka hancur atau rusak," ujar badan Penyelamatan Anak-anak, hari Rabu.

Serbu toko roti

Sementara, penduduk Gaza kini terancam kelaparan karena persediaan bahan makanan yang menipis. Penduduk Gaza juga kini hidup dalam kegelapan. Akiran listrik terhenti gara-gara tidak adanya pasokan bahan bakar solar untuk pembangkit listrik diesel di sana. Bank Dunia khawatir kesehatan warga Gaza terancam karena persediaan air bersih dan air minum menipis. Sistem pembuangan pun semakin banyak yang tidak berfungsi.

Direktur Operasi UNRWA (badan PBB yang bertanggung jawab atas pengungsi Palestina) untuk Gaza, John Ging, mengatakan kini Gaza menjadi semacam "neraka di dunia" bagi 1,5 juta warga Gaza. "Hentikan saja pertikaian ini. Jangan hanya selama tiga jam tetapi selama 24 jam setiap hari," kata Ging pada Sky Television.

Memanfaatkan waktu tiga jam bebas serangan itu, warga di Gaza beramai-ramai keluar rumah dan memenuhi toko-toko roti dan barang-barang kebutuhan hidup lainnya. Ada pula yang bersegera ke rumah sakit untuk menjenguk saudara yang terluka atau mencari sanak saudara yang hilang.

"Tetapi banyak toko yang kosong kehabisan stok barang. Tiga jam itu terlalu cepat. Kami tidak punya makanan, air, atau listrik," kata Mohammad Azzan (45), warga Gaza.

Menanggapi "gencatan senjata tiga jam" Israel, pemimpin senior Hamas, Musa Abu Marzuk, menyatakan Hamas juga tidak akan menembakkan satu pun roket ke arah Israel selama tiga jam. "Saya kira tak akan ada satu pun roket yang ditembakkan dalam tiga jam itu," kata Marzuk seperti dikutip dari pernyataan juru bicara Marzuk, Osama Abu Khaled.

Akan tetapi, kata Khaled sambil menegaskan, hal itu tidak berarti bahwa Hamas juga menyetujui gencatan senjata dengan Israel. "Penundaan serangan itu diputuskan oleh Israel. Gerakan perlawanan Palestina akan tetap melawan agresi Israel," ujarnya.

Senada dengan pernyataan dari Israel, Hamas juga menegaskan sampai saat ini masih membicarakan rencana itu dan belum memutuskan kebijakan apa pun. Hamas juga kurang yakin Israel benar-benar serius dengan gencatan senjata itu. "Buktinya, sampai saat ini saja Israel masih saja memperluas dan meningkatkan serangannya," kata tokoh Hamas, Ghazi Hammad.

Serangan terakhir

Para pemimpin Israel dilaporkan akan membicarakan "serangan terakhir" militer Israel di Gaza yakni menyerbu wilayah perkotaan Gaza. Strategi ini akan menjadi serangan pamungkas selama 11 hari. Operasi militer "puncak" Israel itu akan dibicarakan dalam sidang kabinet Olmert. Dua pakar politik Israel yang tidak mau disebutkan namanya mengaku kabinet itu akan membahas operasi militer tahap ketiga dan keempat atau terakhir.

Pengamat militer menyatakan pasukan Israel akan menghadapi tantangan berat jika sampai masuk ke "jantung kota". Pejuang Hamas yang menguasai seluk-beluk kota akan menggunakan taktik perang gerilya. Jika strategi ini dilakukan maka Israel akan sulit mengalahkan Hamas.

Dukungan pesawat tempur juga tidak akan banyak berarti karena tidak dapat menjangkau persembunyian Hamas.(Kompas)

3. Australia Janjikan Ubah Citra Buruk Indonesia di Media

Buruknya citra Indonesia di media Australia membuat Duta Besar Australia untuk Indonesia menjanjikan kisah-kisah nusantara yang lebih baik melalui program magang mahasiswa jurnalistik di Jakarta.

Survei Australian Strategic Policy mengungkap media-media Australia selalu mengikuti perkembangan Indonesia dan berita-berita mereka berdampak besar positif maupun negatif di mata masyarakat Australia. Survei menemukan 31 persen rakyat Australia masih menganggap Indonesia sebagai ancaman besar sebagai imbas peristiwa bom di Bali, di depan kedutaan Australia di Jakarta serta Hotel JW Marriot. Selain itu, kebebasan pers di Indonesia juga ternoda di mata media kangguru terkait kasus tewasnya lima jurnalis Australia di Balibo, Timor Leste.

Mulai kemarin sekitar 33 mahasiswa *Aussie* memulai magang kerja di enam media cetak dan siaran nasional Indonesia, yang menurut Farmer, diharapkan akan menjadi jurnalis-jurnalis muda yang lebih mengerti pokok permasalahan kedua negara.

"Laporan tepat dan mutakhir oleh media yang memiliki pemahaman yang baik memainkan peran penting dalam mendukung saling pengertian dan persahabatan antara dua negara kita," kata Farmer, Rabu (7/1).

Para mahasiswa yang difasilitasi Australian Consortium for in-Country Studies in Indonesia (ACICIS) tersebut pertama-tama akan mempelajari bahasa Indonesia di Universitas Atmajaya sebelum akhirnya magang di media seperti *Tempo*, *Metro TV*, *RRI*, *Radio 68H*, *Jakarta Globe* dan *The Jakarta Post*.

"Bagaimanapun, Indonesia memiliki segudang kisah menarik yang menunggu untuk ditemukan dan disebarluaskan," kata Farmer.

Hubungan Indonesia dan Australia sendiri mulai memburuk di tahun 1999, saat negeri kangguru itu aktif terlibat dalam perang kemerdekaan Timor Leste. Ketegangan baru mulai mencair saat Presiden Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan ke Canberra, sehingga setahun kemudian, di Jakarta, Perdana Menteri John Howard menyatakan komitmen Australia mendukung kesatuan Republik Indonesia.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah diplomatik kedua negara, Howard sebagai perdana menteri Australia menghadiri langsung pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden di tahun 2004. Meski demikian, hubungan bilateral Indonesia Australia masih mengalami jalan buntu terkait citra buruk nusantara di media mereka serta kekukuhan negeri kangguru yang belum mencabut larangan perjalanan pasca Bom Bali. (Jurnal Nasional)

I | | .

NASIONAL :

A. POLITIK :

1. Interfaith leaders urge UN to stop Israeli attacks

Dozens of interfaith leaders and politicians visited the United Nations office in Jakarta on Wednesday to pressure it to put an end to the Israeli strikes against Gaza.

They asked the UN to prove its effectiveness as an international body by ending days of attacks that have killed hundreds of Palestinians, including women and children.

Led by Muhammadiyah chairman Din Syamsuddin, the group of scholars from different religions conveyed their concerns in a written statement to UN Resident Representative El Mostafa Benlamlah.

"We come here because we still trust in the UN and we hope this organization has not become ineffective and meaningless as an international organization," Din told reporters at the UN office on Jl. Thamrin, Central Jakarta.

The statement condemned the "Israeli aggression as a gross violation of human rights and a naked crime against humanity".

"We urge the UN to take necessary measures by issuing and enforcing a resolution to force the Israeli government to stop the brutality. We also urge the UN to impose serious sanctions on Israel," Din added.

He warned the fighting would aggravate global tensions and conflicts, thus hampering efforts to establish peace in the world.

Among those also in attendance were the Jakarta State Islamic University (UIN) rector Komarudin Hidayat, Catholic leader Benny Susetyo, Protestant leader Nathan Setiabudi and the Hindu Darma Association's A.S. Kobalen.

Senior politicians present included A.M. Fatwa, Moeryati Sudibyo, Effendy Choiry and Hamdan Zoelva, with labor union leader Mochtar Pakpahan and renowned dangdut singer Rhoma Irama also making an appearance.

"We are so sad about what's happening in Palestine, especially to women and children.

We hope the UN will do something and not just watch and smile,"Kobalen said.

Benlamlah promised to convey the statement to the UN headquarters in New York.

He said what was going on in Palestine was not a religious issue, but rather a conflict between the strong and the weak, with both sides seeking justice and peace.

"We do agree with you that there is a lot of frustration about the way the UN is working.

We still have to use the existing UN mechanism to achieve peace,"he said.

He added said the UN Security Council was working hard to resolve the Palestine-Israel conflict with support from European nations.

"The UN is not a superpower and is not a super government.

We are just a forum," he said."We maintain dialogs and put pressure on [attaining] peace."

The attacks that began on Dec. 27 have drawn daily protests worldwide. In Jakarta, the Indonesian Ulema Council (MUI) on Wednesday called for a boycott of US products because of "American double standards" over the Israeli military strikes on Palestine.

"I think a boycott of US products could serve as a lesson to the superpower for the double standards it applies," MUI chairman Ma'ruf Amin said as quoted by Antara news service.

Former UIN rector Azyumardi Azrasaid such a boycott would not be effective and would only make hurt Indonesians.

"We have only a few American products here, mostly Indonesian-owned fast-food restaurants that are franchises.

The employees are also Indonesian,"he said.

In Surabaya, the MUI's East Java office and several mass organizations sealed off a Jewish house of worship.

"The sealing off of the synagogue is in response to the Israeli attacks, because people here are so angry. Azyumardi said. (The Jakarta Post)

2. **Pemilu Harus Bersih dari Politisasi Isu Asing**

PB PMII kembali menegaskan ketidaksukaan organisasi mahasiswa yang dekat dengan Nahdlatul Ulama itu terhadap upaya partai tertentu memolitisasi berbagai isu asing, termasuk kemelut Palestina. "Pemilu legislatif (pileg) dan juga pemilu presiden (pilpres) harus benar-benar bersih dari politisasi isu Palestina dan isu-isu asing lainnya," tandas Sekjen Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Zaini Shofari, di Jakarta, Kamis (8/1).

Menurut Zaini, upaya partai politik (parpol) tertentu melakukan politisasi isu-isu asing, khususnya kemelut Palestina, tidak saja mencederai proses pemilu yang diharapkan berkualitas dan bersih, tetapi juga sudah masuk pada area kabar kebencian atau rasis.

Bagi PB PMII, lanjutnya, apa yang terjadi sekarang dengan mengangkat isu Palestina, sangat kuat terkesan jargon atas nama agama selalu jadi garda terdepan.

"Padahal, konflik politik-ekonomi yang sesungguhnya terjadi di sana (Palestina)," ungkapnya.

Keimanan Diadu Domba

Isu ini (agama), demikian Zaini Shofari, jelas merugikan tatanan keberagaman yang dibangun mayoritas penduduk. "Tatanan keberagaman yang telah dibangun mayoritas

penduduk yang kondusif ini, kemudian digerayangi, dan keimanannya diadudombakan, demi tujuan politik tertentu yang ujung-ujungnya untuk kepentingan para elite demi merebut kekuasaan politik via pemilu dan lain-lain," ujarnya. Ia lalu mengajak semua pihak, khususnya para elite yang selama ini memelopori penggalangan massa untuk peduli kepada masalah kemanusiaan di Palestina, agar tidak melupakan pula spirit perdamaian.

"Semangat kemanusiaan tetap penting digalang, tetapi harus digelorkan untuk perdamaian sesama manusia ciptaan Tuhan. Lebih dari itu, khusus buat para elite politik, bukankah banyak cara santun mencari 'suara' dari sekadar memolitisasi persoalan-persoalan dan isu agama," tanya Zaini Shofari. (Sinar Harapan)

3. Pertemuan Informal RI-GAM Tetap Penting

Untuk tidak menimbulkan kecurigaan, perlu ada penjelasan dari delegasi sepulang dari pertemuan.

PERTEMUAN informal yang dilakukan pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tetap penting. Menurut Wakil Ketua Komisi I (bidang pertahanan dan luar negeri) DPR Yusron Ihza Mahendra, justru pertemuan tidak resmi lebih efektif menjaga hubungan dan komunikasi yang sudah berjalan menjadi lebih baik.

Dia menjelaskan, meski sudah ada nota kesepahaman (MoU) pada 15 Agustus 2005 lalu, bukan berarti tidak ada riak-riak kecil yang timbul di Aceh. "Hubungan baik harus terus dijaga," katanya saat dihubungi *Jurnal Nasional* di Jakarta, Rabu (7/1).

Yusron menanggapi pertemuan tertutup sejumlah petinggi GAM dengan pejabat RI di Helsinki, Finlandia. Pertemuan dua hari yang berakhir, Senin (5/1) itu membahas sejumlah agenda terkait keamanan dan hak asasi manusia di Aceh pascakonflik yang melibatkan kedua belah pihak.

Dalam pertemuan delegasi GAM terdiri dari Mentroe Malik, Zaini, Muzzakir Manaf, Ampon Nazar, dan juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Ibrahim Syamsuddin.

Sedangkan pemerintah diwakili Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Departemen Kehakiman dan HAM Harkristuti Harkrisnowo, Duta Besar RI di Finlandia Farid Husein, dan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Letjen Bambang Darmono.

Sebelumnya, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, pertemuan hanya digelar informal. Kumpul-kumpul orang yang pernah terlibat dalam perundingan. "Tidak ada agenda dari pemerintah," kata Faizasyah.

Yusron menolak anggapan pertemuan di Finlandia menunjukkan konflik Aceh masih mendapat perhatian khusus dunia internasional. Dia meminta publik selalu tidak mencurigai apa yang dilakukan pemerintah. Sebaliknya, dia berharap, sepulang dari pertemuan delegasi pemerintah menjelaskan apa saja yang dibicarakan dan dicapai dalam pertemuan tersebut.

"Kalau ditutupi malah menimbulkan kecurigaan," kata politisi Partai Bulan Bintang itu. Hal berbeda diungkapkan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi. Menurutnya, pertemuan bisa diartikan masih mengakui keberadaan GAM di Aceh.

"Kalau masih bertemu membahas masalah keamanan dan lain-lain, berarti ada pengakuan GAM itu masih ada," katanya. Dia mengatakan, adanya gejolak di Aceh lebih disebabkan masa transisi dari konflik yang besar. Kalaupun perlu ada evaluasi, sebaiknya mengatur sendiri keadaan di dalam negeri.

Muladi melihat pertemuan menjadi langkah mundur. Seolah-olah ada kegagalan dalam pelaksanaan kesepahaman yang sudah disepakati. "Pemerintah harus jelaskan pertemuan tersebut," katanya. (Jurnal Nasional)

B. EKONOMI

:

1. SBY: Produk Indonesia Harus Lebih Kompetitif

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap, di tengah krisis global yang terjadi, produk buatan Indonesia dapat lebih kompetitif dibandingkan produk luar negeri dengan harga yang lebih murah dan berkualitas baik.

Menurut Presiden, produk Indonesia bila dipasarkan di dalam negeri pun harganya harus lebih murah. Dengan demikian produk dalam negeri dapat lebih dicintai seperti slogan "Aku Cinta Produk Indonesia" yang dapat membuat perekonomian Indonesia berkembang lebih pesat. "Saya

yakin bisa bersaing, insya Allah bisa," ujar Presiden dalam sambutan penyerahan penghargaan Upakarti, Rintisan Teknologi, dan Indonesia Good Design Selection (IGDS) 2008 di Istana Negara Jakarta kemarin.

Presiden menegaskan, 2009 yang dicanangkan sebagai Tahun Indonesia Kreatif harus dapat menjadikan negeri ini sanggup bersaing dengan negara mana pun. Untuk mewujudkan semua itu, ujar Presiden, juga mesti didukung berbagai kebijakan pemerintah yang membantu usaha dalam negeri. "Kalau barang-barangnya kompetitif, apalagi dengan inovasi, dengan rintisan, dengan desain tadi, mau dijual ke mana pun bisa. Mau dalam negeri oke, mau luar negeri oke," tandas Presiden.

Dengan demikian, menurutnya, bila pasar luar negeri sedang paceklik, barang-barang tersebut dapat dijual di dalam negeri. Menurut Presiden, Indonesia memiliki pasar yang besar mengingat penduduknya berjumlah 230 juta jiwa dan akan terus bertambah setiap tahun. Kondisi ini dapat meningkatkan daya beli, termasuk pendapatan per kapita. Potensi yang luar biasa tersebut, menurut Presiden, harus bisa dijadikan sebagai domestic market sehingga dalam waktu 10–20 tahun ke depan ekonomi domestik Indonesia akan semakin kuat.

Presiden menyerahkan penghargaan Upakarti 2008 kepada 19 orang yang dinilai berjasa dalam bidang pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) serta kalangan usaha. Penerima penghargaan Upakarti terdiri atas 1 orang kategori jasa pengabdian, 3 jasa kepeloporan, 5 jasa pelestarian, 5 jasa kepedulian, dan 5 IKM modern. Para penerima penghargaan Upakarti untuk jasa kepedulian tahun 2008 diterima Wali Kota Pekanbaru Herman Abdullah, Bupati Jepara Hendro Martojo, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, Wali Kota Bau-Bau MZ Amirul Tamim, dan Wali Kota Sorong Jonathan Annes Jumame.

Penghargaan Rintisan Teknologi diberikan kepada lima penerima. Sementara penghargaan Indonesia Good Design Selection (IGDS) diberikan kepada sembilan penerima. Penghargaan Upakarti mulai diberikan pada 1985 untuk mendorong partisipasi masyarakat luas dalam pengembangan industri kecil dan menengah. Penghargaan ini telah diberikan kepada 979 penerima.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan, Upakarti merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah kepada mereka yang telah berdedikasi tinggi melakukan sesuatu secara luar biasa dalam pengembangan IKM. Di antaranya berasal dari kalangan dunia usaha, lembaga, praktisi, dan pemerintah daerah.

"Sedangkan penghargaan Rintisan Teknologi diberikan kepada pihak-pihak yang berhasil mengembangkan teknologi di sektor industri, mulai dari riset sampai produksi dan dikomersialkan guna mendorong peningkatan kemampuan teknologi industri," ujarnya. (Koran Sindo)

2. PENJUALAN PRODUK PERIKANAN Eksportir Perlu Jajaki Pasar Timur Tengah

Pemerintah mengimbau eksportir produk perikanan segera menjajaki pasar Timur Tengah. Ini menyusul menurunnya permintaan ekspor produk perikanan di Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Uni Eropa (UE) akibat krisis global belakangan ini. "Pasar Timur Tengah, khususnya melalui Uni Emirat Arab (UEA), dapat dijadikan salah satu pasar alternatif untuk perluasan pasar produk perikanan Indonesia," kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Martani Husein dalam siaran pers yang diterima Suara Karya di Jakarta, Rabu (7/1).

Menurut dia, produk perikanan yang diminati di negara-negara Timur Tengah, di antaranya udang, lobster, bandeng, dan tilapia. Demikian juga untuk produk olahan kalengan yang sangat banyak peminatnya. Untuk itu, para pengusaha perikanan perlu aktif menjajaki dan menindaklanjuti pangsa pasar perikanan di Timur Tengah, khususnya UEA. Tim DKP sendiri sudah melakukan kunjungan dan pertemuan ke berbagai pusat pemasaran hasil perikanan di Timur Tengah, yakni di Abu Dhabi, Dubai, Ajman, dan Sharjah. "Saya kira pasar produk perikanan di Timur Tengah sangat potensial untuk memasarkan produk perikanan Indonesia," ujar dia.

Peluang pasar produk perikanan Indonesia di UEA, menurut Martani, juga bisa dijadikan sebagai jembatan penghubung kegiatan perdagangan dan jasa keuangan untuk seluruh wilayah Timur Tengah dan sekitarnya. "Infrastruktur sudah tersedia, terutama di Dubai, baik transportasi udara maupun laut skala internasional baik dari Indonesia atau dari Dubai ke negara lain di Timur Tengah dan Afrika," tuturnya.

Dengan demikian, UEA dapat dijadikan simpul distribusi barang dan jasa ke wilayah Timur Tengah, Eropa dan Afrika, baik produk perikanan maupun produk lainnya. Kebutuhan juga terus meningkat mengingat jumlah wisatawan yang datang ke UEA. Impor produk perikanan di UEA selama ini dipasok dari Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan hanya sebagian kecil dari Indonesia. Untuk produk ikan segar dipasok dari Oman serta produk ikan asin dipasok dari India, Pakistan, dan Bangladesh. "Sedangkan Indonesia baru mengeksport ikan hias laut yang kini bisa dilihat di akuarium laut terbesar di Dubai Mall dan Hotel Atlantis Dubai. Saya berharap para pelaku usaha perikanan bisa memanfaatkan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Dubai untuk promosi produk.

Sementara itu, dalam tiga bulan terakhir di 2008, jumlah ekspor produk perikanan ke Amerika Serikat (AS) tertekan akibat dampak krisis keuangan global. Dampaknya juga terasa di Pasar Uni Eropa (UE) dan Jepang. Permintaan diperkirakan mengalami penurunan sekitar 15 persen sehingga target ekspor untuk tahun 2009 diperkirakan tidak naik dibanding 2008 yang hanya mencapai 2,6 miliar dolar AS. Selain menurunnya permintaan, persaingan dari negara-negara pengeksport juga semakin ketat. (Suara Karya)

3. Indonesia Ekspor Beras pada Februari

Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono mengemukakan, pemerintah mengisyaratkan akan mengeksport beras ke sejumlah negara tetangga. Namun rencana ekspor beras ini akan direalisasikan jika target produksi beras nasional tahun 2009 terpenuhi dengan tingkat surplus yang memadai. "Ekspor beras ke luar negeri tetap akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat demi menyelamatkan harga beras nasional," kata Anton di Semarang, Rabu (7/1).

Menurut dia, pada Februari, Indonesia hampir dipastikan mulai mengeksport beras berkualitas tinggi, tanpa harus menunggu realisasi produksi nasional. Target produksi beras nasional pada 2009 diperkirakan mencapai 47 juta ton atau setara 63 juta ton gabah kering giling (GKG). Seandainya produksi beras dalam negeri melimpah, maka akan memicu jatuhnya harga beras di dalam negeri sehingga dampaknya akan sangat merugikan para petani. "Menjaga ketersediaan pangan, tidak cukup hanya dengan menggenjot produksi," tutur Anton.

Dia menambahkan, beberapa negara tetangga di kawasan ASEAN sudah menyatakan ketertarikannya untuk mengimpor beras dari Indonesia, seperti Timor Timur, Malaysia, serta Filipina. (Suara Karya)

C. SOSBUD

1. RI bidik wisatawan kawasan Asean

Kalangan industri pariwisata Indonesia yang hadir di bursa pariwisata Asean Tourism Forum (ATF) ke 29 di Hanoi, Vietnam, siap membidik pasar wisatawan di kawasan ini untuk menggalakkan perjalanan intra Asean.

"Saya sendiri sudah mengikuti kegiatan ATF untuk yang ke 22 kalinya menjadi seller [penjual] di bursa pariwisata ini dan hasilnya efektif terutama untuk mendatangkan wisatawan dari kawasan Asean ke Indonesia," ujar Herman Rukmanadi, Ketua DPD Asita Jabar, hari ini per telepon.

Menurut dia, meskipun berlangsung dari 7-13 Januari 2009, namun bagi kalangan industri pertemuan yang efektif adalah pada sesi Travel Exchange (Travex) di mana penjual dan pembeli (buyer) dapat bertransaksi secara efektif.

Tahun lalu dari pertemuannya di ATF Bangkok, pihaknya dapat mendatangkan sedikitnya 1.500 wisatawan dari kawasan ini terutama Malaysia dan Thailand. Pihaknya berharap, pada bursa ATF kali ini juga bisa membidik lebih banyak wisatawan Thailand dengan memadukan paket wisata belanja serta wisata spiritual.

Prinsipnya dalam mengemas paket wisata dengan memahami karakteristik dari wisatawan yang ditanganinya. "Wisatawan Thailand selain suka belanja juga suka ke Borobudur, jadi paketnya ke tempat belanja di Bandung lalu dilanjutkan ke Borobudur dan Yogyakarta. Untuk wisatawan Malaysia sesuai karakteristiknya maka belanja jadi kegiatan utama," jelasnya.

Herman, yang aktif berpartisipasi di berbagai bursa pariwisata dunia seperti di ITB Berlin, mengatakan pada ATF destinasi yang dijual adalah di kawasan Asean begitu pula pembeli dan

penjual paket wisatanya fokus pada pasar yang sama sehingga menjadi ajang untuk menggalakkan wisata intra Asean.

Asean Tourism Forum yang tengah berlangsung di Daewoo Hanoi Hotel dimulai dengan tingkat teknis direktur jenderal, pertemuan tahunan menteri-menteri pariwisata Asean dari 10 negara anggota. Pertemuan para menteri itu dilanjutkan dengan Travex 2009 di Melia Hotel, Hanoi.

Menbudpar Jero Wacik akan mengajak menteri pariwisata negara anggota Asean untuk saling berkunjung menikmati pariwisata yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Tahun lalu, ada sekitar 30 juta penduduk negara-negara Asean melakukan perjalanan untuk mengisi hari liburnya.

Seperti tahun lalu, Depbudpar juga akan memfokuskan pemasaran ke kawasan negara Asean sebagai salah satu solusi untuk mengatasi perlambatan ekonomi yang terjadi di negara-negara Asean yang terkena dampak krisis.

Tahun lalu, lanjut Jero, realisasi kunjungan wisatawan asing ke Indonesia mencapai 6,42 juta orang dengan devisa US\$7,5 miliar, sementara Vietnam sendiri tercatat hanya mendapatkan 4,6 juta kunjungan wisman dengan nilai US\$3,6 miliar. (Bisnis Indonesia)

D. HANKAM

:

1. Presiden Minta Pasukan RI di Lebanon Jaga Keselamatan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan agar pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia yang bertugas di Lebanon Selatan tenang, menjaga keselamatan dan tetap profesional dalam menjalankan tugas.

Pesan itu disampaikan Kepala Negara melalui telepon kepada pimpinan satuan tugas pasukan Kontingen Garuda (Konga) XXV-A/Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), Haryono, di depan Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis siang, se usai menerima laporan perkembangan situasi terakhir di lapangan.

Presiden langsung melakukan pengecekan melalui telepon mengenai keadaan pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia yang sedang bertugas di Lebanon selatan pasca mendengar kabar adanya tembakan roket ke arah Israel dari kawasan itu.

Dalam pembicaraan melalui telepon yang berlangsung sekitar 10 menit dan dilakukan di depan wartawan tersebut Presiden menerima laporan bahwa tembakan roket dari arah Lebanon ke Israel dan sebaliknya terjadi sekitar 35 kilometer dari lokasi pasukan Indonesia.

"Saya sudah mengerti laporan yang kau sampaikan, pertama benar yang diinstruksikan ke prajurit untuk betul-betul jaga diri meningkatkan tindakan keamanan dan siap dengan keadaan darurat meskipun tembakan dari Lebanon itu tidak dekat dengan posisi Indonesia demikian juga sebaliknya," kata Presiden dalam dialog satu arah yang dapat didengar oleh wartawan.

Presiden berpesan agar pasukan perdamaian asal Indonesia berpegang teguh pada prosedur tetap dari PBB dan UNIFIL karena jika situasi berkembang menjadi tidak terkontrol maka pasukan Indonesia boleh jadi berada dalam bahaya.

"Ingat tugas anda sebagai penjaga perdamaian, jadi berlindung dengan baik supaya keselamatan anak-anak terjaga dan tetap jalankan tugas sebagai penjaga perdamaian," kata Presiden.

Kepala Negara meminta agar pimpinan satuan tugas Konga XXV-A menyampaikan kepada panglima tertinggi PBB jika Presiden Indonesia memantau secara langsung kondisi di lapangan dengan harapan PBB, UNIFIL dapat mengemban tugas dengan baik termasuk tentunya pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia.

Presiden juga menitipkan pesan bagi Duta Besar RI di Lebanon agar mendengarkan dengan baik penjelasan Presiden Lebanon Michel Sleiman supaya kontingen Indonesia dapat memahami dengan seksama situasinya.

Se usai pembicaraan melalui telepon itu, Kepala Negara menjelaskan kepada para wartawan bahwa pasukan Indonesia hingga saat ini berada dalam kondisi aman.

"Saya harap tidak ada bahaya meski pasukan kita siap dengan keadaan darurat kalau ada perkembangan yang tidak diharapkan," katanya.

Sementara itu sejak 16 Desember 2008, Konga XXXV-A bertanggungjawab menjaga Kesatrian Pos 7-3, Pos Militer (PM) UNIFIL, Lebanon sektor timur.

Pada Kamis (8/1) tiga roket yang ditembakkan dari Lebanon menghantam Israel utara dan mengakibatkan dua orang luka ringan.

Roket-roket itu adalah yang pertama ditembakkan dari Lebanon sejak tahun 2007, dan terjadi pada hari ke-13 serangan negara Yahudi itu di Jalur Gaza. Tidak segera jelas siapa yang menembakkan roket-roket itu.

Sumber-sumber keamanan Lebanon mengatakan antara tiga hingga lima roket ditembakkan dari Lebanon selatan ke Israel utara. (ANTARA)

2. Mabes TNI Kirim Pasukan Perdamainan dari Unsur TNI AL

Meskipun situasi Timur Tengah masih mengkhawatirkan, setelah meletus perang Israel dengan Pejuang Hamas, Mabes TNI tetap mengirimkan Kongtingen Garuda (Konga) XXVIII/Unifil 2009 ke Lebanon.

Kali ini pengiriman pasukan tidak lagi dari unsur pasukan darat, melainkan pasukan dari TNI Angkatan Laut (AL). Menurut rencana pasukan tersebut akan berangkat akhir Februari 2009.

"Ini pertama kalinya kita mengirimkan unsur TNI Angkatan Laut dilibatkan sesuai dengan permintaan Persatuan Bangsa Bangsa," kata Kasum Mabes TNI Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo kepada wartawan di Surabaya, Kamis (8/1).

Kasum didampingi sejumlah pejabat TNI dari Mabes TNI meninjau kesiapan pasukan yang hendak diberangkatkan ke Lebanon. Selain 110 pasukan yang dikirim, TNI AL juga mengirimkan satu kapal perang, yakni KRI Diponegoro yang di dalamnya terdapat satu helikopter.

"Pasukan ini nanti akan bergabung dengan pasukan dari negara lain yang sudah berada di Lebanon. Tentu sesama unsur dari Maritim," katanya.

Pada tahap awal pasukan ini akan berada di Lebanon selama enam bulan. Namun, bila memungkinkan akan diperpanjang lagi.

Sebelum mereka diberangkatkan, Mabes TNI lebih dulu membekali pasukan tersebut selama dua bulan di Armatim. Pembekalan meliputi penyampaian makalah dari instansi terkait. Selain itu, mereka juga dibekali dengan latihan tempur serta strategi tempur. "Tidak kalah pentingnya mereka diajari mengenali budaya setempat," ujar Didik.

Beberapa tahapan kini disusun untuk mempersiapkan mereka ke Lebanon. Tahapan pertama pematangan pengetahuan budaya serta geogarfis Lebanon. Setelah seluruh proses tahapan selesai, mereka akan diberangkatkan ke Lebanon dengan menumpang KRI Diponegoro. (Media Indonesia)

3. Pulau Terluar Indonesia Terancam Hilang

PULAU terluar Indonesia yang selama ini menjadi acuan teritori wilayah Indonesia terancam hilang, akibat kerusakan alam setidaknya ada 92 pulau terluar yang harus dilindungi.

"Berdasarkan hasil perkiraan Inter Governmental Panel Climate Change (2007), pada 2030 muka air laut akan naik 29 centimeter," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta, Kamis (8/1).

Djoko yang ditemui usai melaksanakan penanaman pohon dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) mengatakan, upaya penyelamatan pulau-pulau terluar sudah sangat mendesak untuk mengamankan teritori Indonesia.

Data Bakornas dalam kurun 2003 - 2005 terjadi 1.430 bencana sebanyak 53 persen disebabkan kondisi alam seperti banjir, longsor, dan angin ribut yang terjadi akibat ulah manusia juga, ungkapnya.

Terjadi alih fungsi lahan hutan setiap tahun 100.000 hektar atau setara 1,5 kali luas DKI Jakarta. Kawasan hutan di pulau Jawa saat ini hanya tersisa sekitar 18 persen dari 13 juta hektar luas yang tersedia.

Angka ini sangat jauh dari ketentuan minimum yang disyaratkan dalam undang-undang kehutanan maupun undang-undang penataan ruang yang menyebutkan minimal 30 persen luas kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus berupa hutan.

Laju konversi lahan sawah yang terjadi cukup mengkhawatirkan. Pulau Jawa Bali yang merupakan lumbung pangan nasional dengan luas lahan 3,5 juta hektar (41 persen sawah di Indonesia) mengalami penyusutan lahan sawah 3.600 hektar per tahun.

Berbagai kondisi ini menjadi penyumbang kerusakan lingkungan sehingga secara tidak langsung juga menjadi penyebab hilangnya pulau-pulau terluar yang selama ini menjadi batas wilayah Indonesia.

Menteri PU itu juga mengatakan untuk melindungi pulau terluar sudah disiapkan alokasi anggaran 2009 yang ditujukan bagi pembangunan jalan dan air minum serta prasarana lain bekerjasama dengan instansi lain.

Seperti pengadaan dermaga bekerjasama dengan Departemen Perhubungan, tenaga listrik bekerjasama dengan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, ungkapnya.

Menteri mengaku, semua fasilitas infrastruktur memang belum dipenuhi 92 pulau terluar tetapi secara bertahap mulai 2009 dipenuhi kelengkapan pulau terluar dalam rangka menjaga teritori.

Sementara Ketua Umum BPP Gapensi, Soeharsojo mengatakan, kalangan pelaksana konstruksi sudah diingatkan agar bekerja menjunjung konsep berwawasan lingkungan.

"Misalnya diupayakan sekecil mungkin tidak menebang pohon, walaupun terpaksa harus diganti lebih banyak lagi, kemudian juga puing-puing yang tidak terpakai tidak dibiarkan berserakan," ungkapnya.

Soeharsojo juga mengingatkan kepada pemerintah untuk memasukkan soal lingkungan ini dalam harga tender sehingga mendorong setiap pekerjaan konstruksi mengutamakan lingkungan. (Jurnal Nasional)

E. HUKUM : Tidak Ada

F. OLAH RAGA : Tidak Ada

G. LINGKUNGAN HIDUP :

1. Menristek Tolak Impor Bibit Hibrida

Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek), Kusmayanto Kadiman, menyatakan menolak impor bibit tanaman hibrida karena tidak secara langsung diketahui kekurangannya.

"Saya tidak terlalu mendukung soal hibrida itu," katanya usai panen raya perdana padi varietas Mira-1 di Desa Plumbon, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, di Temanggung, Kamis.

Hingga saat ini, katanya, masih ada orang yang mengimpor bibit tanaman hibrida.

Ia mengatakan, impor bibit hibrida seperti padi memang dapat diketahui kehebatan produksinya yang mampu mencapai 13 ton per hektare.

"Dari luar negeri, kita tahu hebatnya yaitu dia menghasilkan sampai 13 ton per hektare, tetapi jahatnya apa, kita belum tahu sebelum kita coba, jangan-jangan dia merusak yang lain," katanya.

Kementerian Negara Ristek, katanya, lebih mendorong pengembangan usaha bibit in hibrida ketimbang hibrida.

"Kalau pun kita ke hibrida, harus hibrida lokal, domestik," katanya.

Ia mengatakan, kementeriannya antara lain bertugas meneliti bibit padi, mengupayakan sertifikat sebagai hak paten dari Departemen Pertanian, dan kemudian memperbanyak untuk petani.

"Sesudah mendapatkan sertifikat maka terserah kami, apakah mau perbanyak sendiri, tapi kami bukan badan yang memperbanyak, karena itu kami mempunyai mitra yang fokusnya adalah penyediaan bibit, salah satunya BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Sang Hyang Sri," katanya. (ANTARA)

III. ARTIKEL :

1. Presuming a democratic Myanmar: Looking beyond election 2010 (by Nehginpao Kipgen)

It is sad to see a government sentencing its own citizens to prison terms ranging from six months to 65 years. The alleged convicts are none other than some of the most admired artists, revered monks and peaceful activists who dearly love their country.

The international community's political rhetoric, without any substantive action, has emboldened the military generals to advance their seven-step road map toward a "disciplined and flourishing democracy" slowly but steadily.

It was not surprising to see UN chief Ban Ki-moon's lukewarm reaction toward a largely symbolic petition submitted to him by 112 former world leaders asking him to visit Burma (Myanmar) in the wake of widespread arrests in recent weeks and months. The Dec. 3 petitioners included Jimmy Carter and Tony Blair, among others.

Out of frustration, Ban -- through his spokesperson Michele Montas -- responded to the letter and said: "...will not be able to do so without reasonable expectations of a meaningful outcome, which is what we have been saying all along...."

What could that paper tiger achieve anyway? Had the same letter been sent by the same number of incumbent world leaders, it would have had better leverage. The move was an encouraging sign, but will have very minimal impact, if any.

It would be more efficacious if the 112 world leaders instead convinced their own governments to take pragmatic action in line with what the UN chief is asked of.

It is the UN Security Council that can initiate effective action and the good offices of the Secretary-General that can implement, and not vice-versa. Ban Ki-moon sees the limitations his good offices can play in the absence of any enforcement mechanism.

If Ban were to go to Myanmar without having to achieve any substantive results, he could demean the Secretary General's office. His basic demands such as the release of political prisoners and an initiation of dialogue with the opposition groups have not materialized.

Instead of listening to the repeated calls for the release of political prisoners, the military authority -- in recent weeks -- has handed down long prison terms to anyone seen to be a disturbance in the upcoming 2010 election.

On the other hand, the military was sending yet another clear message to the international community. Senior General Than Shwe was heard bragging about the 15-year existence of the military-backed Union Solidarity and Development Association (USDA) and its rising 24.6 million members.

On the fourth day of the association's 15th anniversary on Nov. 29, Gen. Than Shwe was heard saying: "...plans are well underway to see to the remaining steps including the 2010 transition work program. So, it is fair to say that the future of the State structure is certain to materialize".

In the new constitution, 25 percent of the seats in both houses of parliament (House of Representatives and House of Nationalities) are reserved for the military. Amendment of the constitution will require the approval of more than 75 percent of the votes. In other words, the constitution has been designed to perpetuate military rule.

The generals learned a lesson from the 1990 general election -- any free and fair election will go in favor of the National League for Democracy (NLD) and other democratic opposition groups. It remains to be seen whether the NLD will be allowed to participate in the election.

If the NLD is barred from the election or if the party chooses not to participate, the political scenario beyond the 2010 election could become even murkier. While the new government will be busy with its own agendas, the NLD will continue to lobby the international community to recognize the 1990 election results.

The 2010 election will bring a transition to Myanmar, but the new government will still be directly or indirectly under the military. One other significant implication is that the results of 1990 general election will become bygone history.

As usual, the international community will send mixed responses regarding the election outcome. While most western nations will not or perhaps will reluctantly recognize the results, many Asian governments will welcome it as a positive step toward democracy.

It is these conflicting approaches that have given the military generals political breathing space. Sanctions versus engagements and or appeasements by the international community are responsible for the military regime's survival.

One must not, however, believe that the successful implementation of the State Peace and Development Council's seven-step road map will bring an end to Burma's decades-old political problems.

We will continue to see simmering political turmoil in the country. The military generals are indifferent to and even anathema toward any concept of federalism, which has been the basic demand of the country's ethnic nationalities -- with the exception of the Myanmarese.

A long-lasting solution to Myanmar's problems needs the sincerity, honesty and participation of all ethnic groups. Different ethnic groups should be brought into confidence, and their legitimate demands should be examined. This process of democratization has to be an inclusive approach.

Myanmar's political landscape could still be dramatically changed before and after the 2010 general election provided that the international community steps up a coordinated "stick and carrot" approach.

Meanwhile, the military junta's capability should not be undermined. The regime takes pride in having one of the largest armies in the region with over 400,000 personnel. The military is also well protected by the UN Security Council's veto structure.

If the international community is serious about finding a solution to Myanmar's political problems, it should take actions that can make a difference. There are ways to bring down or convince the military generals.

Military intervention, a model based on the six-party talks regarding North Korea's nuclear stand-off and the UN Security Council Resolution will be some of the swiftest, if not most effective, tools to bring about a democratic change in Myanmar. However, none of the above is likely to happen in the near future.

If no realistic action is on the agenda, the international community should look beyond the 2010 election and start planning for new policies and strategies to be pursued under a new military-controlled government. (The Jakarta Post)

IV. LAIN-LAIN : T i d a k
Ada
V. EDITORIAL :

1. PBB dan Krisis Kepercayaan Dunia

SUDAH lebih dari 11 hari pasukan Israel terus-menerus menyerang dan membombardir Jalur Gaza lewat serangan darat, laut, dan udara. Lebih dari 560 orang tewas dan ribuan warga Gaza lain luka-luka akibat keganasan agresi Israel tersebut.

Seluruh dunia mengecam dan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghentikan serangan Israel. Upaya penyelesaian konflik lewat jalur diplomasi di level Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pun menemui jalan terjal karena sikap berbeda dari lima negara anggota tetap DK PBB yang cenderung "memaklumi" tindakan keji Israel di Jalur Gaza. Kecuali Amerika Serikat (AS) yang sikapnya jelas membela kepentingan Israel; empat negara anggota tetap, Inggris, China, Rusia, dan Prancis kurang all out memperjuangkan resolusi gencatan senjata.

Mereka terkesan menunggu dan mencari posisi aman dalam bersikap. Posisi Indonesia sendiri yang dari awal konsisten mendukung Palestina hingga kini berupaya meyakinkan negara-negara anggota Gerakan Nonblok (GNB) untuk mendorong digelar sidang darurat Majelis Umum PBB. Langkah ini sudah tepat karena dalam posisi sekarang sulit mengharapkan peran DK PBB karena dominannya pengaruh the big five (lima anggota tetap DK PBB).

Negara-negara Arab maupun negara-negara muslim yang tergabung dalam Liga Arab maupun Organisasi Konferensi Islam (OKI) juga belum optimal menekan the big five agar menghentikan serangan Israel di Gaza sekaligus membujuk kelompok Hamas agar menahan diri demi terciptanya gencatan senjata. Negara-negara tetangga Palestina sendiri juga terlihat ragu menyikapi serangan Israel ini. Malah mereka cenderung menunggu daripada proaktif mencari terobosan-terobosan diplomasi yang nyaris buntu pada level DK PBB.

Perpecahan internal Palestina antara faksi Hamas dan Fattah juga turut mengurangi percepatan penyelesaian konflik mereka dengan Israel. Agresi ke Gaza ini adalah ujian berat bagi PBB di bawah kepemimpinan Ban Ki-moon. Diplomat senior Korea Selatan ini didukung banyak negara menjadi sekjen PBB dengan harapan bisa mewarnai pengambilan keputusan di lembaga yang beranggotakan 192 negara itu.

PBB menuai kritik keras karena dianggap tidak mampu menghentikan ambisi AS dan sekutunya menginvasi Irak tahun 2003 dengan alasan yang sumir tentang pengembangan senjata kimia. Belakangan diketahui bahwa alasan yang dikemukakan AS untuk menggulingkan

rezim Saddam Hussein ternyata tidak terbukti. Tapi yang terjadi di Irak justru pertumpahan darah, perang saudara, dan kekacauan yang kita tidak tahu kapan akan berhenti.

Karena itu, banyak negara anggota PBB mengharapkan peran Ban Ki-moon bisa mengimbangi kemauan dan ambisi negara-negara the big five, khususnya AS. Terutama dalam isu paling sensitif di dunia: konflik Israel-Palestina. Di tengah kepercayaan negara-negara anggotanya yang kian tipis itulah PBB diharapkan mampu bersikap tegas terhadap Israel dan memaksa mereka menghentikan serangan dan kembali ke jalur perundingan. PBB jangan hanya jadi tukang stempel kemauan the big five yang kerap mengorbankan kepentingan negara-negara lemah.

Setidaknya para petinggi PBB harus resah dengan sebutan “macan ompong” yang disematkan pada mereka. Ketidakadilan DK PBB dalam menyikapi berbagai kasus sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Ingat betapa cepatnya AS menggerakkan anggota DK untuk menjatuhkan sanksi kepada Irak, Iran, Korea Selatan, Myanmar, Kuba, Venezuela, dan negara-negara yang berseberangan dengan mereka. Meskipun bukti-bukti pelanggaran sangat lemah dan penuh manipulasi. Tapi ketika Israel membantai ratusan warga Gaza, AS terlihat ogah-ogahan.

Alih-alih memberi sanksi tegas kepada Israel, menyampaikan kecaman keras pun begitu sulit mereka ucapkan. Jika praktik-praktik ketidakadilan di dunia modern ini terus terjadi, bukan mustahil fungsi dan peran badan dunia seperti PBB bakal kehilangan arti. Negara-negara akan berpikir tidak ada gunanya lagi menjadi anggota PBB kalau hanya dijadikan legitimasi negara-negara kuat. Para pimpinan negara-negara di luar the big five harus mulai memikirkan sistem tata dunia baru yang pastinya lebih baik dari yang ada sekarang. (Koran Sindo)

2. **Akhiri Segera Kebrutalan di Gaza**

Serangan Israel di Jalur Gaza semakin ganas. Pada hari ke-11 serbuan Selasa lalu, peluru mortir Israel telah mengenai sebuah sekolah PBB.

Serangan itu menewaskan 40 orang, di antaranya wanita dan anak-anak yang tengah mengungsi dari ancaman perang. Dalam pembelaannya, militer Israel mengatakan, pihak Hamas telah menembakkan roket dari lokasi dimaksud. Namun, PBB telah menyerukan diadakannya penyelidikan independen atas kejadian tersebut.

Terus meningkatnya jumlah korban tewas dalam konflik Gaza kali ini telah menimbulkan keprihatinan mendalam—selain kemarahan—berbagai kalangan di dunia, dan karena itu muncul seruan makin kuat agar aksi Israel segera diakhiri. Banyak pihak mengkhawatirkan, kalau serangan negara Yahudi ini tidak segera diakhiri, akan semakin banyak warga kota Gaza yang menjadi korban.

Para diplomat memperkirakan, Rabu kemarin PM Israel Ehud Olmert akan terbang ke Mesir untuk membahas gencatan senjata, tetapi masih belum bisa diduga format penyelesaiannya. Yang banyak diketahui adalah Israel tidak akan menghentikan serangan sebelum menghancurkan kemampuan Hamas menembakkan roket ke wilayahnya.

Lepas dari apa pun motif dan sasaran Israel, yang jelas serangan terhadap warga sipil harus diperkarakan. Christopher Gunnes, juru bicara badan PBB untuk urusan pengungsi Palestina, tegas mengatakan, pihak mana pun dalam konfrontasi ini yang melanggar hukum humaniter internasional harus diadili. Hal yang sama ditegaskan Sekjen PBB Ban Ki-moon.

Dilatarbelakangi oleh kerisauan itu, masuk akal kalau dunia—khususnya kuasa-kuasa besar yang memiliki pengaruh atas Israel—harus turun tangan segera untuk membantu mengakhiri konflik yang cenderung semakin brutal dan hingga Selasa telah menewaskan tak kurang dari 640 orang ini. Kemarin kita mendengar Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dalam pertemuannya dengan Presiden Mesir Hosni Mubarak telah menyerukan kedua pihak yang bertikai untuk menerima gencatan senjata.

Jika langkah ini yang ingin ditempuh, pihak Israel yang didukung AS telah mengajukan syarat, tak ada lagi penyelundupan senjata ke Gaza melalui terowongan yang melalui Mesir. Untuk menjamin hal ini, diperlukan pengawas internasional yang ditugaskan di sepanjang perbatasan Mesir.

Selain aspek teknis tersebut, kita lebih mencemaskan situasi yang kini ada di Gaza. Laporan badan bantuan internasional menyebutkan, situasi kemanusiaan di Gaza makin hari makin merosot. Tidak kurang tiga perempat dari 1,5 juta warga Gaza kini sudah hidup tanpa listrik dan ada ratusan ribu orang yang tidak punya air bersih.

Atas dasar itu semua, kita berharap para pemimpin dunia bisa menyetujui penghentian konflik berdarah ini. (Kompas)

Jakarta, 8 Januari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu